



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

RENCANA STRATEGIS



2021-2026

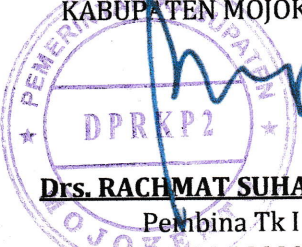
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Arah pembangunan dalam rangka menghadapi perkembangan era otonomi daerah, serta pesatnya dinamika perkembangan kondisi makro (global) secara menyeluruh harus dapat dijadikan sebagai momentum bagi pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta mengatasi hambatan dan tantangan yang ada untuk proses percepatan pembangunan daerah khususnya terhadap pembangunan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal pembangunan tahun 2021-2026 dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Akhirnya semoga Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. RACHMAT SUHARYONO
Pembina Tk I
NIP.19731120 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, 1

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 1

KABUPATEN MOJOKERTO..... 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 11

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 15

2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah 18

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 32

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KEWENANGAN..... 33

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD..... 33

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 33

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra..... 33

3.3.1 A.Faktor Penghambat aatau Kelemahan..... 34

3.3.2 B Faktor Pendorong/Kekuatan 34

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis. 35

3.5 Penentuan ISU-ISU Strategis 35

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 36

4.2 Sasaran..... 36

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 38

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto..... 38

5.2 Arah Kebijakan 38

BAB VI RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 40

BAB VII PENUTUP 104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arah pembangunan dalam rangka menghadapi perkembangan era otonomi daerah, serta pesatnya dinamika perkembangan kondisi makro (global) secara menyeluruh harus dapat dijadikan sebagai momentum bagi pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta mengatasi hambatan dan tantangan yang ada untuk proses percepatan pembangunan daerah khususnya terhadap pembangunan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan.

Dengan melihat kompleksitas permasalahan pembangunan ke depan, dimana dinamika otonomi dan globalisasi dengan akselerasi yang selaras sangat menuntut adanya penataan ulang (Perencanaan yang komprehensif) agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto khususnya Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dapat tetap dinamis dan efektif dalam menjawab tantangan kedepan, maka perlu adanya suatu perencanaan yang strategis dan komprehensif sehingga dengan semakin terarah dan terakomodasinya berbagai variable pembangunan yang ada diharapkan diperoleh penajaman arah pembangunan yang kompeten dan akurat. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan daerah, khususnya pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika perlu menyusun suatu rumusan program dan kegiatan secara berjenjang menurut skala prioritas dalam suatu Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan pembangunan yang disusun secara komprehensif tersebut harus mampu mengakomodasi segala potensi dan peluang sumber daya (Alam, Manusia, dll) dan memperhatikan segala hambatan baik yang endemis maupun yang berpotensi menjadi permasalahan serius di masa mendatang sehingga didapat suatu perencanaan yang terarah, terprogram dan berkesinambungan. Sebab dampak era keterbukaan (global) pada saat setelah diberlakukannya otonomi daerah akan membawa permasalahan yang serius terutama bagi daerah/Kabupaten yang tidak siap menghadapinya. Khususnya pada bidang perumahan, permukiman dan perhubungan menjadi lebih kompleks, dimana pertumbuhan dan kebutuhan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman serta dinamika pergerakan manusia, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta kendaraan maupun barang akan lebih cepat, massal dan butuh keterpaduan yang tinggi antar sub sistem. Sehingga menjadi satu kesatuan sistem yang baik, yaitu :

Pengembangan sistem bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan perhubungan :

1. Pengembangan kawasan kumuh
2. Pengembangan rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan standart pelayanan minimal (SPM)
3. Pengembangan sistem bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
4. Pengembangan sistem bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
5. Pengembangan sistem registrasi, penegakan hukum, operasional manajemen rekayasa lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas

Disamping itu dengan semakin pesat dan canggihnya perkembangan teknologi informasi (TI) dan tingginya ketergantungan kepada TI, serta semakin tingginya tuntutan masyarakat dan adanya persaingan yang lebih tajam akan sangat ditentukan bagaimana kemampuan suatu daerah dalam mem-visi-kan pembangunan serta menjabarkan dan mengimplementasikannya dalam kegiatan pembangunan untuk menjawab tantangan di atas.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal pembangunan tahun 2021-2026 dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (10) : “Rentra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;

2. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rerncana Prembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah agar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto mempunyai arah dan langkah-langkah yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjawab permasalahan dan tuntutan yang melingkupinya agar didapatkan suatu perbaikan keadaan (hasil pembangunan) sesuai dengan yang direncanakan.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 kedalam rencana kegiatan strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
2. Menjabarkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif OPD

3. Menyediaan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan
4. Melakukan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah disusun

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi DPRKP2 sebagai satuan kerja pemerintah daerah dibidang perumahan, permukiman dan perhubungan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka didalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPRKP2 KABUPATEN MOJOKERTO

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto adalah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi :
 - 1) Seksi Perumahan;
 - 2) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - 3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
- d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, membawahi :
 - 1) Seksi Kawasan Permukiman;
 - 2) Seksi Pertanahan;
 - 3) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas, membawahi :
 - 1) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 2) Seksi Perparkiran;
 - 3) Seksi Terminal.
- f. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
 - 1) Seksi Angkutan;
 - 2) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3) Seksi Keselamatan dan Ketertiban.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti yang tercantum dalam Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah merupakan pedoman pelaksanaan tugas yang berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan :

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

II. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan upt di lingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

III. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum serta pemanfaatan dan pengendalian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (skbg);

- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

IV. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi kawasan permukiman, pertanahan serta inventarisasi dan perencanaan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- c. Pelaksanaan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
- d. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- e. Pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) daerah;
- g. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan;
- h. Pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- i. Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- j. Pelaksanaan penetapan tanah ulayat;
- k. Pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong;
- l. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- m. Pelaksanaan penerbitan izin membuka tanah;
- n. Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

V. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi prasarana dan sarana, perparkiran serta

terminal. Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan prasarana dan sarana lalu lintas;
- b. Perumusan bahan kebijakan umum dan teknis bidang prasarana dan sarana lalu lintas;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional, prasarana dan sarana lalu lintas, perparkiran dan terminal;
- d. Perumusan bahan penetapan prasarana dan sarana lalu lintas, perparkiran dan terminal;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidang prasarana dan sarana lalu lintas, perparkiran dan terminal;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

VI. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi angkutan, manajemen rekayasa lalu lintas serta keselamatan dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Perumusan bahan rumusan kebijakan umum dan teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Perumusan bahan penetapan jaringan jalan, perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidang angkutan jalan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti yang tercantum dalam Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah merupakan pedoman pelaksanaan tugas yang berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan :

VII. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

VIII. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- d) Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e) Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan upt di lingkungan dinas;
- g) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

IX. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum serta pemanfaatan dan pengendalian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- b) Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;

- c) Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d) Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (skbg);
- e) Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

X. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi kawasan permukiman, pertanahan serta inventarisasi dan perencanaan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b) Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- c) Pelaksanaan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
- d) Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- e) Pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- f) Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) daerah;
- g) Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan;
- h) Pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- i) Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- j) Pelaksanaan penetapan tanah ulayat;
- k) Pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong;
- l) Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- m) Pelaksanaan penerbitan izin membuka tanah;
- n) Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- o) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- p) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

XI. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi prasarana dan sarana, perparkiran serta terminal. Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a) Perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan prasarana dan sarana lalu lintas;
- b) Perumusan bahan kebijakan umum dan teknis bidang prasarana dan sarana lalu lintas;
- c) Pelaksanaan pembinaan teknis operasional, prasarana dan sarana lalu lintas, perparkiran dan terminal;
- d) Perumusan bahan penetapan prasarana dan sarana lalu lintas, perparkiran dan terminal;
- e) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang prasarana dan sarana lalu lintas, perparkiran dan terminal;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

XII. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi angkutan, manajemen rekayasa lalu lintas serta keselamatan dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi :

- a) Perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b) Perumusan bahan rumusan kebijakan umum dan teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c) Pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d) Perumusan bahan penetapan jaringan jalan, perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang angkutan jalan;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

- a. Sumber Daya Manusia Aparatur
Aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdiri atas :
 - a) Golongan IV : 5 orang
 - b) Golongan III : 31 orang
 - c) Golongan II : 38 orang
 - d) Golongan I : 3 orang

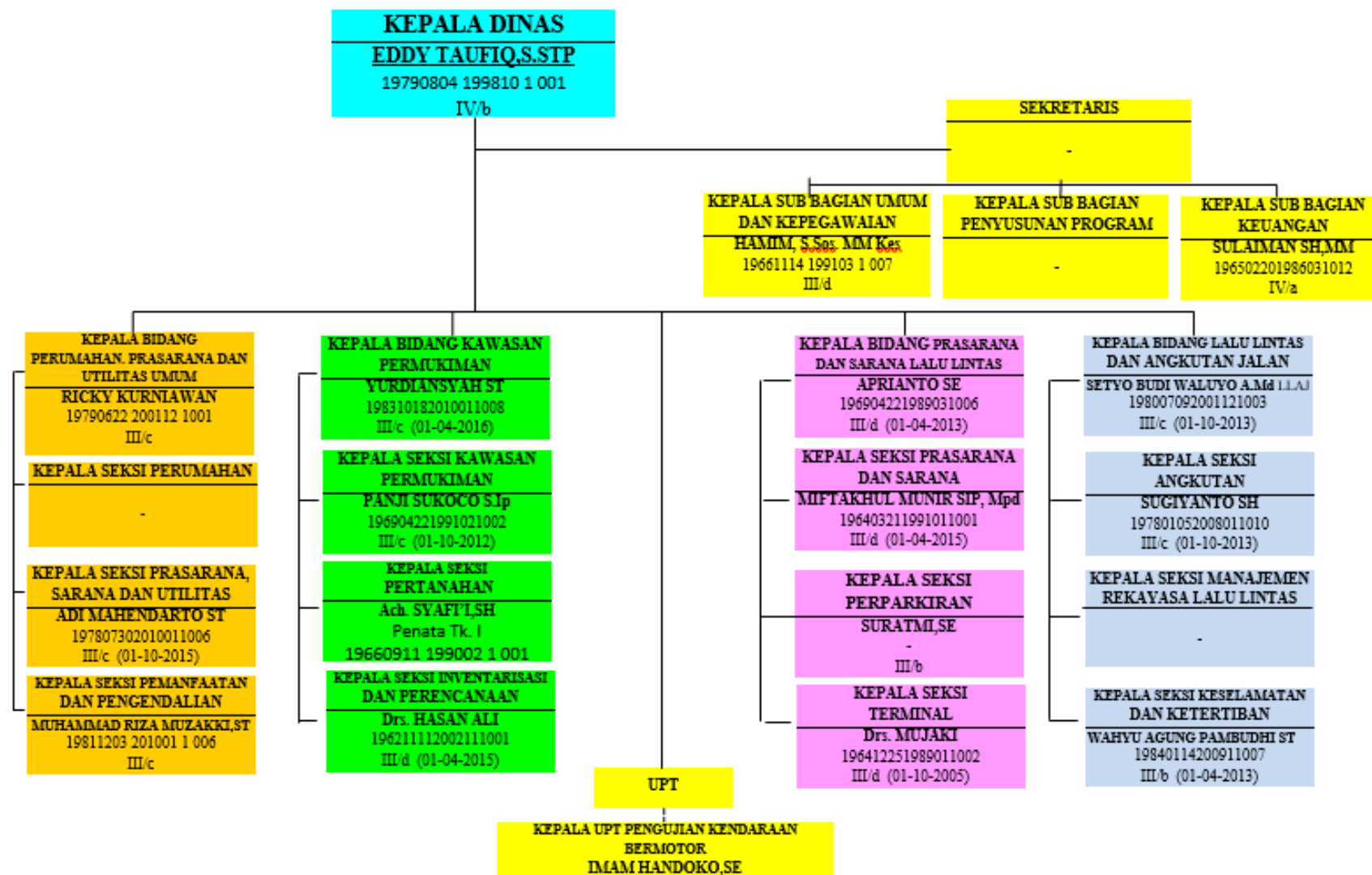
Sedangkan jenjang pendidikan aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdiri atas :

- a) Strata 2 (S2) : 4 orang
- b) Strata 1 (S1) : 28 orang
- c) Diploma 4 (D4) : 1 orang
- d) Sekolah Menengah Atas (SMA) : 39 orang
- e) Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 3 orang
- f) Sekolah Dasar (SD) : 2 orang

- b. Sarana dan Prasarana Kerja
Sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdiri atas :
 - 1. Aset berupa tanah sarana umum terminal 6 lokasi
 - 2. Kendaraan dinas roda empat 15 unit dan sepeda motor 20 unit
 - 3. Alat-alat bengkel 6 unit dan alat ukur sejumlah 11 unit
 - 4. Alat-alat kantor 77 unit, alat rumah tangga 82 unit, alat meubelair 94 unit, alat komputer 80 unit.
 - 5. Alat-alat studio 16 unit dan komunikasi sejumlah 5 unit berupa amplifier/mic/corong
 - 6. Gedung kantor 3 lokasi untuk sarana transportasi (terminal) termasuk UPT Terminal dan UPT Pegujian Kendaraan Bermotor, gedung dan bangunan lainnya
 - 7. Bangunan Monumen/rambu sejumlah 2590 unit berupa alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL)

8. Instalasi Listrik, Telepon Fax 1 unit dan Telepon 1 unit

BAGAN STRUKTUR DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN



Adapun sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.2 PNS DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Skretaris	-	-	-
3.	Kepala Bidang	4	-	4
4.	Kepala Sub Bagian	2	-	2
5.	Kepala Seksi	8	1	9
6.	Kepala UPT	1	-	1
7.	Kepala TU UPT PKB	-	-	-
8.	Staff	57	3	60
	JUMLAH	77	4	77

Tabel 2.3 PNS DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	S – 3	-	-	-
2.	S – 2	4	-	4
3.	S – 1	25	3	28
4.	D – IV	1	-	1
5.	SLTA	39	1	40
6.	SLTP	3	-	3
7.	SD	2	-	2
	JUMLAH	77	4	77

2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPRKP2 Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa indikator kinerja DPRKP2 Kabupaten Mojokerto disajikan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel TC - 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPRKP2 2016-2020

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	200.000.000,00	200.000.000,00		228.000.000,00	225.000.000,00					117.554.354,00					
	Penyediaan Jasa Pem.& Perijinan Kend.Dinas / Ops.	10.000.000,00	19.100.000,00		25.170.000,00	22.653.000,00					9.986.200,00					
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	33.250.000,00		37.554.000,00	34.000.000,00					33.753.420,00					
	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	550.000.000,00	550.000.000,00		600.000.000,00	504.512.500,00					495.135.200,00					
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	29.375.000,00		155.000.000,00	67.500.000,00					64.790.000,00					
	Penyediaan Makanan & Minuman	33.000.000,00	31.350.000,00		33.000.000,00	24.848.000,00					24.844.000,00					

	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar & Dalam Daerah	85.000.00 0,00	80.750.00 0,00		60.000.0 00,00	43.696.68 8,00					42.743.37 6,00					
	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	37.440.00 0,00	37.440.00 0,00		40.213.4 40,00	40.213.44 0,00					37.440.00 0,00					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-			38.850.0 00,00	32.100.00 0,00					17.100.00 0,00					
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	20.000.00 0,00	19.955.00 0,00		20.000.0 00,00	18.000.00 0,00					17.998.80 0,00					
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kend.Dinas Ops.	55.000.00 0,00	20.000.00 0,00		55.000.0 00,00	39.992.00 0,00					39.989.13 2,00					
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	30.000.00 0,00	55.000.00 0,00		30.000.0 00,00	25.000.00 0,00					25.000.00 0,00					
	Pengadaan Peralatan Survey Permukiman dan Pertanahan		30.000.00 0,00		75.000.0 00,00	-					-					
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Negara															

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	61.960.000,00			40.000.000,00											
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan															
	Penyusunan Rencana Tahunan Dan Laporan Kinerja SKPD	25.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	9.000.000,00					8.465.000,00					
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan															
	Penganugrahan Duta Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)	25.000.000,00	85.000.000,00		76.500.000,00	6.549.600,00					6.549.600,00					
	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	550.000.000,00	30.000.000,00		692.454.000,00	697.454.000,00					695.853.991,00					
	Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	50.000.000,00	50.000.000,00		52.200.000,00	52.200.000,00					51.153.039,00					
	Peningkatan Disiplin Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi Forum LLAJ	50.000.000,00	70.000.000,00		63.000.000,00	26.350.000,00					26.350.000,00					
	Duta Tertib Lalu Lintas	25.000.000,00	30.000.000,00		27.000.000,00	9.799.900,00					9.799.900,00					

	Pengamanan Insidentil	50.000.00 0,00	60.000.0 00,00		79.200.0 00,00	179.200.0 00,00					177.365.0 00,00					
	Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Angkutan Jalan	25.000.00 0,00	30.000.0 00,00		27.000.0 00,00	10.000.00 0,00					9.350.000 ,00					
	Pemeliharaan Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.00 0,00	50.000.0 00,00		67.500.0 00,00	67.500.00 0,00					66.654.80 0,00					
	Pengadaan Sistem Aplikasi PKB				265.500. 000,00											
	Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber- sumber Pendapatan Daerah	300.000.0 00,00	196.200. 000,00		174.000. 000,00	200.000.0 00,00					195.684.0 00,00					
	Program Pengembangan Perumahan															
	BOP Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya				45.000.0 00,00	48.282.50 0,00					47.545.21 7,00					
	BOP Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah	187.880.0 00,00	187.880. 000,00		90.000.0 00,00											

	Penunjang DAK Bidang Perumahan (APBD)		54.233.000,00		148.000.000,00	129.407.500,00					122.601.668,00					
	Penunjang DAK Bidang Perumahan (APBN)		73.187.000,00		137.290.000,00	120.044.000,00					120.044.000,00					
	Sinkronisasi Data Kawasan Permukiman				45.000.000,00											
	BOP Penerbitan Rekomendasi Ijin Lokasi				22.500.000,00											
	Penataan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman				90.000.000,00											
	Pembangunan Sarana Pendukung Kawasan Permukiman				90.000.000,00	589.200,00					589.200,00					
	Program Lingkungan Sehat Perumahan															
	Penunjang Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Pondok Pesantren				82.755.000,00											
	Penunjang Kegiatan TIM Verifikasi PSU Perumahan				137.790.000,00	50.000.000,00					40.050.000,00					

	Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan				152.325.000,00	200.000.000,00					158.261.000,00					
	BOP Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)				67.500.000,00	31.591.050,00					31.591.050,00					
	BOP Penerbitan Rekomendasi Ijin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman					-										
	Penyusunan raperda Makam					100.000.000,00										
	Pemeliharaan Makam Mantan Bupati Mojokerto					50.000.000,00					48.720.000,00					
	Program Air Bersih Sanitasi															
	Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)		910.000.000,00		1.225.000.000,00	490.000.000,00					490.000.000,00					
	BOP Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)		115.000.000,00		90.000.000,00	70.000.000,00					66.009.772,00					
	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas															

	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan		50.000.000,00		27.000.000,00	150.000.000,00					150.000.000,00					
	Pemeliharaan Pagar UPT. Terminal Mojosari		150.000.000,00													
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	200.000.000,00	100.000.000,00		90.000.000,00	150.000.000,00					149.261.400,00					
	Pengadaan Peningkatan Fasilitas Penunjang Jalan	600.000.000,00	250.000.000,00		2.090.000.000,00	450.000.000,00					446.301.450,00					
	Pengadaan Rambu APILL				500.613.250,00											
	Pengadaan Flasher dan Warning light		176.000.000,00		90.000.000,00	196.000.000,00					194.854.950,00					
	Pengadan Kartu Uji dan Tanda Uji Kendaraan Bermotor				500000000											
	JUMLAH				8.942.914.690,00	4.496.262.128,00					4.264.168.219,00					

Kegiatan 2020

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					96 2.423.628										
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					225.000.000					117.554.354,00					
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					22.653.000					9.986.200,00					
	Penyediaan alat tulis kantor					34.000.000					33.753.420,00					
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					504.512.500					495.135.200,00					
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					67.500.000					64.790.000,00					
	Penyediaan makanan dan minuman					24.848.000					24.844.000,00					
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah					43.696.688					42.743.376,00					

	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja					40.213.440					37.440.00 0,00					
						115.092.000										
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					32.100.000					17.100.00 0,00					
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					18.000.000					17.998.80 0,00					
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					39.992.000					39.989.13 2,00					
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					25.000.000					25.000.00 0,00					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					9.000.000					8.465.00 0,00					
	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD					9.000.000					8.465.000 ,00					
	Program Pengembangan Perumahan					249.451.500										

Penunjang DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman (APBN)					120.044.000					120.044.000,00					
Penunjang DAK REGULER Bidang Perumahan dan Permukiman					129.407.500					122.601.668,00					
Program Prasarana dan Sarana Lalu Lintas					1.193.454.000										
Pengadaan Flasher dan Warning Light					196.000.000					194.854.950,00					
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas					150.000.000					149.261.400,00					
Peningkatan Pengelolaan Perparkiran					697.454.000					695.853.991,00					
Rehabilitasi /Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan					150.000.000					150.000.000,00					
Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					551.599.500										
Peningkatan Disiplin Masyarakat pengguna dan jasa transportasi Forum LLAJ					26.350.000					26.350.000,00					
Penganugrahan Duta Tertib Lalu-lintas					6.549.600					6.549.600,00					

(Wahana Tata Nugraha)																
Duta Tertib Lalu Lintas					9.799.900					9.799.900,00						
Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Angkutan Jalan					10.000.000					9.350.000,00						
Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru					52.200.000					51.153.039,00						
Pengamanan insidentil					179.200.000					177.365.000,00						
Pemeliharaan Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor					67.500.000					66.654.800,00						
Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah					200.000.000					195.684.000,00						
Program Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum					250.000.000											
BOP Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya					48.282.500					47.545.217,00						

Penunjang Kegiatan Tim Verifikasi PSU Perumahan					50.000.000					40.050.000,00					
Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan					200.000.000					158.261.000,00					
Program Permukiman dan Pertanahan					659.196.450										
BOP Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah					-					-					
Pembangunan Sarana Pendukung Kawasan Permukiman					589.200					589.200,00					
BOP Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)					70.000.000					66.009.772,00					
BOP Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)					31.591.050					31.591.050,00					
Pengadaan Peralatan Survey Permukiman dan Pertanahan					-					-					
BOP Penyusunan Perda Pemakaman					17.016.200					17.016.200,00					
BOP Penerbitan Rekomendasi Izin					-					-					

	Permukiman dan Pertanahan															
	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)					490.000.000					490.000.0 00,00					
	Pemeliharaan Makam Bupati					50.000.000					48.720.00 0,00					
	Program Prasarana Sarana Lalu Lintas					457.762.550										
	DAK Fisik Bidang Keselamatan Jalan (PENUGASAN)					-					-					
	Penunjang DAK PENUGASAN Bidang Keselamatan Jalan					7.762.550					7.762.500 ,00					
	Pengadaan/Peningkata n Fasilitas Penunjang Jalan					450.000.000					446.301.4 50,00					
	TOTAL					4.496.262.128, 00					4.264.16 8.219,00					

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah dibentuknya Perangkat Daerah Gabungan dimana urusan Perumahan dan Permukiman itu mengampu 3 Kementrian, hal tersebut sangat membebani pada perangkat daerah yang dibentuk. Untuk urusan Perumahan dan Permukiman dengan SDM dan Sarana Prasarana yang kurang sehingga dalam pelaksanaan lapangan masih kurang efektif dan efisien, beberapa program usulan sesuai dengan permintaan data juga masih belum bisa mendapatkan anggaran sehingga pemenuhan data sebagai sistem penilaian intern pemerintah tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Peluang yang dapat mengembangkan urusan Perumahan dan Permukiman adalah di telaah hasil RTRW memberikan peluang untuk pengembangan Perumahan dan Permukiman itu sebagai salah satu dasar Urusan Perumahan dan Permukiman untuk megembangkan Perangkat Daerah di Lima Tahun Mendatang.

Tantangan pada urusan Perhubungan makin berkurangnya Mobil Kendaraan Umum dan mengakibatkan fungsi terminal berkurang, dan juga adanya sistem ojek online (Gojek, Grab dll) sehingga membuat peminat angkutan umum semakin berkurang, serta adanya kredit motor yang mudah membuat masyarakat cenderung memiliki banyak kendaraan pribadi,

Peluang urusan Perhubungan adalah dengan memberdayakan fungsi terminal dialihfungsikan sebagai pasar contoh terminal brangkal dan terminal lespadangan sehingga menambah kegiatan ekonomi masyarakat lainnya dan memberfungsikan urusan perhubungan ke pusat-pusat kegiatan masyarakat untuk pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima Tahun mendatang.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KEWENANGAN

Banyak hal yang terkait dalam permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, sehingga timbul beberapa isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

1. Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat milik pribadi yang murah untuk mendapatkannya, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kesemrawutan lalulintas.
2. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalulintas kurang sopan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas.
3. Kabupaten Mojokerto merupakan Wilayah Gerbang Kertasusila dan dekat dengan ibukota provinsi sehingga menjadi wilayah dengan tingkat lalulintas kendaraan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan potensi kerawanan lalulintas.
4. Regulasi WTN dari Kementerian Perhubungan belum turun sampai dengan Tahun 2019 sehingga pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha tidak bisa dilaksanakan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam menjalankan Visi dan Misinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) terkait visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia

Misi : Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Dalam menjalankan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan dijabarkan dalam rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan di tindak lanjuti dengan Rencana Strategis (Rancangan Perubahan Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan akan senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang

bersifat strategis dimana pengaruh lingkungan tersebut akan sangat menentukan pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun lingkungan strategis yang dimaksud adalah lingkungan internal yang terdiri dari faktor faktor penghambat ataupun faktor faktor pendorong dari Pelayanan Perangkat Daerah

Misi Bupati tersebut senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis dimana pengaruh lingkungan tersebut akan sangat menentukan pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.3.1 A.Faktor Penghambat atau Kelemahan

1. Belum optimalnya kinerja aparat sebagai akibat masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan ketrampilan mengenai aspek teknis dan operasional.
2. Keterbatasan wewenang dalam melakukan pengendalian dan penegakan hukum.
3. Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang berkelanjutan untuk menunjang SDM yang berkualitas.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan operasional.
6. Masih terbatasnya kemampuan manajerial dari sebagian besar staf mengenai aspek operasional kegiatan.
7. Masih lemahnya kepastian hukum terutama aspek kepegawaian (*reward and punishment*).
8. Masih kurang mantapnya kinerja lembaga akibat tumpang tindihnya tupoksi antar instansi.
9. Masih kurangnya tenaga dengan kualifikasi pendidikan yang memadai dan kompatibel.
10. Masih kurangnya sumber dana untuk operasional kegiatan pada masing-masing bidang.
11. Masih kurangnya jumlah staf masing-masing bidang.
12. Belum optimalnya pemanfaatan sarana yang dimiliki dalam rangka menunjang kegiatan dinas.
13. Letak kantor jauh dari pusat pemerintahan.

3.3.2 B Faktor Pendorong/Kekuatan

1. Adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto melalui Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016
2. Adanya dukungan sumber pendanaan yang berasal dari APBD
3. Menjadi Perangkat Daerah penghasil (PAD)

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.

Dengan adanya (RTRW) Rencana Tata Ruang Wilayah membantu DPRKP 2 dalam memetakan pengembangan kawasan Permukiman dan peningkatan Sanitasi Air juga meminimkan Luas Kawasan Kumuh Terkait hal tersebut Kami belum bisa menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah karena Perangkat Daerah yang mengampu kegiatan tersebut baru dibentuk Tahun 2017.

3.5 Penentuan ISU-ISU Strategis

1. Semakin banyaknya jumlah penduduk dan rumah tangga baru yang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni.
2. Semakin berkembangnya industri properti.
3. Semakin berkurangnya transportasi umum membuat menurunnya jumlah penumpang sehingga secara faktual mengurangi/menggangu fungsi terminal.
4. Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat milik pribadi yang murah untuk mendapatkannya, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kesemrawutan lalulintas.
5. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalulintas kurang sopan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas.
6. Kabupaten Mojokerto merupakan Wilayah GerbangKertasusila dan dekat denga ibukota propinsi sehingga menjadi wilayah dengan tingkat lalulintas kendaraan yang cukup tinggi sehingga sehingga menimbulkan potensi kerawanan lalulintas.
7. Regulasi WTN dari Kementrian Perhubungan belum turan sampai dengan Tahun 2018 sehingga pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha tidak bisa dilaksanakan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari sasaran 2 RPJMD yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Reviu Renstra;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Perubahan Renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan Misi ke 7 Bupati menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan misi " Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan penataan kawasan permukiman sesuai fungsi tata ruang yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah", maka ditetapkan tujuan :
 - a. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka pada Renstra di Tahun 2021-2026, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana Jalan yang terpasang dan terpelihara
2. Meningkatnya pelayanan perhubungan
3. Meningkatnya rumah layak huni
4. Meningkatnya penanganan luasan kumuh

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto

- 1. Menyusun dokumen-dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan
- 2. Meningkatkan kualitas jalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh
- 3. Meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infastrutur permukiman, pedesaan serta infrastruktur ekonomi strategis

5.2 Arah Kebijakan

- 1. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- 2. Penataan kawasan kumuh
- 3. Pengembangan System sarana dan prasarana LLAJ
- 4. Pengembangan System pengembangan teknologi LLAJ

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Insfrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia			
MISI : Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	1. Meningkatnya kualitas insfrastruktur perumahan dan permukiman	Meningkatnya kualitas pelayanan	

	2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi		
--	--	--	--

BAB VI
RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Dalam mendukung terlaksananya Visi Misi Bupati terpilih Perangkat Daerah didukung Program dan Kegiatan serta Pendanaan nya sehingga Visi Misi Bupati terpilih bisa tercapai, adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Pendannan seperti pada Tabel TC -27

TABEL T-C 27
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TABEL 6.1
(Tabel T-C 27 dalam Lampiran Kepmendagri 050 Tahun 2020)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Thn. 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Program/Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun Ke-1 (2022)		Tahun Ke-2 (2023)		Tahun Ke-3 (2024)		Tahun Ke-4 (2025)		Tahun Ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, social, budaya dan pelestarian lingkungan	Meningkatkan infrastruktur kualitas perumahan dan permukiman																	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2)	Kab. Mojokerto
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Indeks kepuasan masyarakat/ aparaturn terhadap pelayanan	100% =														

			Perangkat Daerah	kesekretariatan PD														
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	3 dokumen = 5000000													
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Program dan Kegiatan PD	7 dokumen													
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan PD	100%													
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan = 10078452477													
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan	12 bulan = 155000000													

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan PD															
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan= 208000000														
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	12 bulan= 180000000														
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan														
					12 bulan= 99000000														

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.														
			Administrasi Umum Perangkat Daerah															
			Penyediaan Bahan/Materi al	Jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 paket = 30000000													
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi	1 paket = 540000000													
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan	12 bulan= 25000000													

				makanan dan minuman															
			Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas luar daerah 12 Bulan	12 bulan = 55000000														
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan /perpanjangan perizinan kendaraan dinas operasional	4 unit = 67750000														
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 gedung = 18000000														

			Kantor dan Bangunan Lainnya	dan berfungsi dengan baik														
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	77 unit = 24500000													
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat/ aparaturnya terhadap pelayanan kesekretariatan PD														
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	77 ASN													
			Sosialisasi Peraturan	Jumlah kegiatan	1 kegiatan= 50000000													

			Perundang-Undangan	sosialisasi perundang-undangan yang terlaksana														
			PROGRAM PENGEMBAN GAN PERUMAHAN	Tingkat Pengembangan Perumahan	100%													
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota															
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang terdata	1 laporan = 50000000													
			Sosialisasi dan Persiapan															

			Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																
			Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	1 kegiatan														
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan	Jumlah kegiatan pemenuhan komitmen	1 kegiatan = 25000000														

			Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik yang terfasilitasi ex. Data backlog														
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian, pembangunan dan pengembangan tentang Perbub PSU perumahan	100%													
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Layak Huni	100%													

			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman																
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas penerbitan izin yang terpenuhi	1 fasilitas = 25000000														
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Persentase kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	100% = 75000000														

				tentang BOP KOTAKU															
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																
			Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen yang tersusun dan terlegalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan kumuh pada kec. Mojosari	1 dokumen = 100000000														
			Pembentukan /Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Pembinaan kelompok swadaya masyarakat pada kegiatan BOP KOTAKU Jumlah Pembinaan kelompok swadaya	1 kelompok = 0														

				masyarakat pada kegiatan BOP PAMSIMAS Jumlah Pembinaan kelompok swadaya masyarakat pada kegiatan BOP PISEW															
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Perumahan Kumuh	Jumlah kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/perumahan kumuh	1 kegiatan														
			Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																

			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah bantuan stimulan perumahan yang terlaksana -- Pembangunan Fisik Perumahan (APBN) Pendamping DAK bidang Perumahan (APBD) Penunjang DAK fisik perumahan	DAK (APBN) =64 unit BSPS = 240 unit = (Rp 1.442.329.000,00)												DPRKP2	Kab. Mojokerto
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Skor pengendalian penyelenggaraan permukiman kumuh yang terlaksana	1 Kegiatan = 65000000													
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Persentase Lingkungan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan														

			UTILITAS UMUM (PSU)																
			Urusan Penyelenggara an PSU Perumahan																
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase pemeliharaan PSU Perumahan yang terlaksana	35 PSU = 100000000														
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase pemeliharaan penyediaan PSU Perumahan yang tersedia untuk menunjang fungsi hunian	100% = 120000000														
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronsasi pengendalian pembangunan dan	1 kali = 55917359														

			Utilitas Umum Perumahan	pengembangan perumahan														
Mewujudkan pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, social, budaya dan pelestarian lingkungan	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang terlaksana														
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota															
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Lalu Lintas dan Kelancaran Arus Lalu Lintas	100% = 90000000													
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi	Jumlah kegiatan kebijakan	2 kegiatan = 38000000													

			Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang ditetapkan														
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang terkendali	4 rakor = 100000000													
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Rambu APIL Jumlah prasarana jalan (Flasher/Warning Light) di jalan kab/kota yang terbangun Jumlah	90 % = 125000000													

				terminal yang dibangun/dipelihara															
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kab/kota yang tersedia Jumlah perlengkapan jalan di jalan kab/kota yang tersedia Jumlah perlengkapan terminal di kab/kota yang tersedia	90% = 50000000														
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terehabilitasi	100% = 90000000														
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																

			Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin peyelenggaraa n dan pembangunan fasilitas parkir	100% = 528000000														
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia															

			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang terpelihara	10 sarpras = 67500000													
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															
			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan	100% = 50000000													

				dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka peningkatan fasilitas penunjang jalan															
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum yang tersedia															
					100% = 100000000														

			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan angkutan umum yang terkendali dan terawasi guna duta tertib lalu lintas Jumlah ketersediaan angkutan umum yang terkendali dan terawasi saat lebaran, natal dan tahun baru Jumlah ketersediaan angkutan umum yang terkendali dan terawasi serta pembinaan angkutan jalan															
				Jumlah	14.912.448.836														

Kegiatan 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Program/Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun Ke-1 (2022)		Tahun Ke-2 (2023)		Tahun Ke-3 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, social, budaya dan pelestarian lingkungan	Meningkatkan infrastruktur kualitas perumahan dan permukiman																	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Kab. Mojokerto

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase target Kinerja OPD yang terpenuhi		100 %	11. 67 0.4 52. 47 7	100%	12. 48 7.3 84. 15 0	100%	13. 36 1.5 01. 04 1	100%	14. 29 6.8 06. 11 4	100%	15. 29 7.5 82. 54 2				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun		100 %	19 0.0 00. 00 0	100%	20 3.3 00. 00 0	100%	21 7.5 31. 00 0	100%	23 2.7 58. 17 0	100%	24 9.0 51. 24 2				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rincian: Penyusunan Dokumen Renstra, Ren	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun		7 Dokumen	5.0 00. 00 0	7 Dokumen	5.3 50. 00 0	7 Dokumen	5.7 24. 50 0	7 Dokumen	6.1 25. 21 5	7 Dokumen	6.5 53. 98 0				

			ja,LRA,CAL K, dsb																
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan yang terkoordinasi dan dapat dikendalikan pelaksanaannya		21 Keg	18 0.0 00. 00 0	21 Keg	19 2.6 00. 00 0	21 Keg	20 6.0 82. 00 0	21 Keg	22 0.5 07. 74 0	21 Keg	23 5.9 43. 28 2				
			Rincian: Kegiatan penyusunan laporan IKM, SOP																
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja yang tersusun		7 Dokumen	5.0 00. 00 0	7 Dokumen	5.3 50. 00 0	7 Dokumen	5.7 24. 50 0	7 Dokumen	6.1 25. 21 5	7 Dokumen	6.5 53. 98 0				
			Rincian : Penyusunan Rencana Tahunan																

			Laporan Kinerja SKPD																
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN terbayar gaji dan tunjangan nya		100 %	10.433.81.437	100%	11.163.718	100%	11.945.178.407	100%	12.781.340.896	100%	13.676.034.758				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terbayar gaji dan tunjangan nya		77 ASN	10.233.81.437	77 ASN	10.949.718	77 ASN	11.716.198.407	77 ASN	12.536.332.296	77 ASN	13.413.875.556				
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terbayarkan		12 bulan	2000.000	12 bulan	21400.000	12 bulan	228980.000	12 bulan	24508.600	12 bulan	262159.202				
			• Intensifikasi dan Ekstensifikasi																

			asi Sumber- Sumber Pendapata n Daerah • Penyediaa n Jasa Tenaga Kerja																
			Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase ketersediaa n jasa penunjang urusan pemerintah an daerah		100 %	38 8.0 00. 00 0	100%	41 5.1 60. 00 0	100%	44 4.2 21. 20 0	100%	47 5.3 16. 68 4	100%	50 8.5 88. 85 2				
			Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telpon, internet, listrik terbayar per bulan		12 bula n	20 8.0 00. 00 0	12 bulan	22 2.5 60. 00 0	12 bulan	23 8.1 39. 20 0	12 bulan	25 4.8 08. 94 4	12 bulan	27 2.6 45. 57 0				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan		12 bula n	18 0.0 00. 00 0	12 bulan	19 2.6 00. 00 0	12 bulan	20 6.0 82. 00 0	12 bulan	22 0.5 07. 74 0	12 bulan	23 5.9 43. 28 2				

			Rincian: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor																
			Administra si Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminstras i Umum Perangkat Daerah terlaksana		100 %	44 1.5 00. 00 0	100%	47 2.4 05. 00 0	100%	50 5.4 73. 35 0	100%	54 0.8 56. 48 5	100%	57 8.7 16. 43 8				
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	jumlah waktu tersedianya jasa peralatan dan gedung kantor		12 bula n	81. 50 0.0 00	12 bulan	87. 20 5.0 00	12 bulan	93. 30 9.3 50	12 bulan	99. 84 1.0 05	12 bulan	10 6.8 29. 87 5				
			• Ketatausa haan dan kepegawai an DPRKP2 (7-13) • Pengadaan Perlengka																

			pan Gedung Kantor																
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	25 0.0 00. 00 0	12 bulan	26 7.5 00. 00 0	12 bulan	28 6.2 25. 00 0	12 bulan	30 6.2 60. 75 0	12 bulan	32 7.6 99. 00 3				
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan		25 jenis	30. 00 0.0 00	25 jenis	32. 10 0.0 00	25 jenis	34. 34 7.0 00	25 jenis	36. 75 1.2 90	25 jenis	39. 32 3.8 80				
			Rincian : Penyediaan Alat Tulis Kantor																
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan		1200 Dos	25. 00 0.0 00	1200 Dos	26. 75 0.0 00	1200 Dos	28. 62 2.5 00	1200 Dos	30. 62 6.0 75	1200 Dos	32. 76 9.9 00				
			Rincian: Penyediaan																

			makanan dan minuman																
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar dan dalam daerah yang terbiayai		100 oh	55.000.000	100 oh	58.850.000	100 oh	62.969.500	100 oh	67.377.365	100 oh	72.093.781				
			Rincian: Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah																
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	90.000.000	100%	96.300.000	100%	103.041.000	100%	110.253.870	100%	117.971.641				

			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Terpenuhiy a Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3 Kendaraan dinas	90.000.000	3 Kendaraan dinas	96.300.000	3 Kendaraan dinas	103.041.000	3 Kendaraan dinas	110.253.870	3 Kendaraan dinas	117.971.641				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara		100 %	112.571.040	100%	120.451.013	100%	128.882.584	100%	137.904.365	100%	147.557.670				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		4 unit	67.750.000	4 unit	72.492.500	4 unit	77.566.975	4 unit	82.996.663	4 unit	88.806.430				

			atau Lapangan																
			• Rincian: Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional • Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional																
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara		3 Gedung	18.000.000	3 Gedung	19.260.000	3 Gedung	20.608.200	3 Gedung	22.050.774	3 Gedung	23.594.328				
			Rincian: Pemeliharaan																

			an Rutin/Berk ala Gedung Kantor																
			Pemelihara an/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaa n rutin/berkal a peralatan gedung kantor		30 kali	26. 82 1.0 40	30 kali	28. 69 8.5 13	30 kali	30. 70 7.4 09	30 kali	32. 85 6.9 27	30 kali	35. 15 6.9 12				
			Rincian:Pe meliharaan Rutin/Berk ala Peralatan Gedung Kantor																
			Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentase kepegawaia n perangkat daerah yang terlaksana		100 %	15. 00 0.0 00	100%	16. 05 0.0 00	100%	17. 17 3.5 00	100%	18. 37 5.6 45	100%	19. 66 1.9 40				

			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan dan sosialisasi Perda Permakaman		25 kali	15.000.000	25 kali	16.050.000	25 kali	17.173.500	25 kali	18.375.645	25 kali	19.661.940				
			Rincian:Penyusunan Peraturan daerah tentang penyelenggaraan permakaman																
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan Layak Huni		100 %	525.000.000	100%	561.750.000	100%	601.072.500	100%	643.147.505	100%	688.167.905				
			Pendataan Penyediaan dan	Persentase terpenuhinya pendataan		100 %	75.00	100%	80.25	100%	85.86	100%	91.87	100%	98.30				

			Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota	penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana			0.000		0.000		7.500		8.225		9.701				
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah data yang diperoleh dalam Update kegiatan perumahan		1 laporan	75.000.000	1 laporan	80.250.000	1 laporan	85.867.500	1 laporan	91.878.225	1 laporan	98.309.701				
			Rincian: Updating Data Perumahan (BackLock)																
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah	Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban		100 %	100.000.000	100%	107.000.000	100%	114.490.000	100%	122.504.300	100%	131.079.601				

			Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota	bencana aatau relokasi terlaksana															
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang terhabilitasi		3 unit	10 0.0 00. 00 0	100%	10 7.0 00. 00 0	100%	11 4.4 90. 00 0	100%	12 2.5 04. 30 0	100%	13 1.0 79. 60 1				
			Rincian: Rehabilitasi rumah																
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase tercapainya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan		100 %	30 0.0 00. 00 0	100%	32 1.0 00. 00 0	100%	34 3.4 70. 00 0	100%	36 7.5 12. 90 0	100%	39 3.2 38. 80 3				
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan	Jumlah aplikasi izin pembangunan dan pengembang		2 Apli kasi	25 0.0 00.	2 Aplika si	26 7.5 00.	2 Aplika si	28 6.2 25.	2 Aplika si	30 6.2 60.	2 Aplika si	32 7.6 99.				

			Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	an perumahan			000		000		000		750		003				
			Rincian: • Penyusunan Aplikasi Klinik Perumahan • Penyusunan Aplikasi SIPARASUT PSU																
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan	Jumlah kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan dan pengendalian perumahan		50 kali	50.0000	50 kali	53.5000	50 kali	57.245000	50 kali	61.252150	50 kali	65.539801				

			gan Perumahan																
			Rincian: Pengawasa n dan pengedalian perumahan tanah kavling																
			Penerbitan Sertifikat Kepemilik an Bangunan Gedung (SKGB)	Persencase tercapainya penerbitan sertifikat kepemilika n bangunan gedung (SKGB)		100 %	50. 00 0.0 00	100%	53. 50 0.0 00	100%	57. 24 5.0 00	100%	61. 25 2.1 50	100%	65. 53 9.8 01				
			Koordinasi dan Sinkronisas i Penerbitan Sertifikat Kepemilika n Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah gedung yang memiliki sertifikat bangunan gedung (SKGB)		20 serti fikat	50. 00 0.0 00	20 sertifik at	53. 50 0.0 00	20 sertifik at	57. 24 5.0 00	20 sertifik at	61. 25 2.1 50	20 sertifik at	65. 53 9.8 01				

			Rincian: Pembuatan sertifikat kepemilika n bangunan gedung																
			PROGRAM KAWASAN PERMUKI MAN	Persentase Luasan Kumuh yang Tertangani		100 %	3.8 05. 00 0.0 00	100%	4.0 71. 35 0.0 00	100%	4.3 56. 34 4.5 00	100%	4.6 61. 28 8.6 15	100%	4.9 87. 57 8.8 18				
			Penataan dan Peningkata n Kualitas Kawasan Permukim an Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha yang tertangani		100 %	17 5.0 00. 00 0	100%	18 7.2 50. 00 0	100%	20 0.3 57. 50 0	100%	21 4.3 82. 52 5	100%	22 9.3 89. 30 2				
			Penyusuna n Rencana Pencegahan	Jumlah lokasi yang terpetakan kondisi kekumuhan		10 loka si	15 0.0 00.	10 lokasi	16 0.5 00.	10 lokasi	17 1.7 35.	10 lokasi	18 3.7 56.	10 lokasi	19 6.6 19.				

			dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				000		000		000		450		402				
			Rincian: Pemetaan kekumuhan pada kawasan permukiman																
			Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah kelompok swadaya masyarakat terbina dalam lokasi kawasan kumuh		10 kelompok	25.000.000	10 kelompok	26.750.000	10 kelompok	28.622.500	10 kelompok	30.626.075	10 kelompok	32.769.900				
			Rincian: Pembinaan Kelompok																

			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase terlaksanya nya peningkatan kualitas kawasan permukiman dibawah 10Ha		100 %	3.6 30.00 0.00	100%	3.8 84.10 0.00	100%	4.1 55.98 7.00	100%	4.4 46.90 6.090	100%	4.7 58.18 9.516				
			Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan /Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Site Plan dan DED peremajaan/ pemugaran kumuh yang tersusun		1 Dokumen	10 0.00 0.00 0	1 Dokumen	10 7.00 0.00 0	1 Dokumen	11 4.490 0.00 0	1 Dokumen	12 2.504 30 0	1 Dokumen	13 1.079 60 1				
			Rincian:Penyusunan Dokumen																

			Rencana Tapak dan DED peremajaan /Pemugaran Permukiman kumuh																
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase tercapainya perbaikan rumah tidak layak huni		100 %	2.100.000	100%	2.247.000	100%	2.404.290.000	100%	2.572.590.300	100%	2.752.671.621				
			Rincian: • Perbaikan RTLH • Penunjang Kegiatan Bedah Rumah RTLH • BOP Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS)																

			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah lokasi permukiman kumuh yang terbangun prasarana permukiman layak		1 RT	24 5.0 00. 00 0	1 RT	26 2.1 50. 00 0	1 RT	28 0.5 00. 50 0	1 RT	30 0.1 35. 53 5	1 RT	32 1.1 45. 02 2	1 RT			
			Rincian: • Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman di Lokasi Permukiman Kumuh																
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah kegiatan pembangunan infrastruktur		1 kegiatan	75. 00 0.0 00	1 kegiatan	80. 25 0.0 00	1 kegiatan	85. 86 7.5 00	1 kegiatan	91. 87 8.2 25	1 kegiatan	98. 30 9.7 01	1 kegiatan			

			Rincian: Biaya operasional kegiatan pencegahan kumuh dan penangana n kumuh dari APBN yakni Program KOTAKU dan PISEW																
			Pelaksanaa n Pembangun an Pemugaran / Peremajaan Permukima n Kumuh	Terbangunn ya prasarana permukiman yang sehat		100 %	1.1 10. 00 0.0 00	100%	1.1 87. 70 0.0 00	100%	1.2 70. 83 9.0 00	100%	1.3 59. 79 7.7 30	100%	1.4 54. 98 3.5 71				
			• DAK Fisik Perumaha n dan																

			Permukiman (APBN) • Penunjang DAK Bidang Perumahan dan Permukiman																
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan kualitas PSU		100 %	2.235.000.000	100%	2.391.450.000	100%	2.558.851.500	100%	2.737.971.105	100%	2.929.629.082				
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan yang terlaksana		100 %	2.235.000.000	100%	2.391.450.000	100%	2.558.851.500	100%	2.737.971.105	100%	2.929.629.082				
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan	Jumlah PSU perumahan		2 Perumahan	1.660.00	2 Perumahan	1.776.20	2 Perumahan	1.900.53	2 Perumahan	2.033.57	2 Perumahan	2.175.92				

			Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	yang terfasilitasi			0.000		0.000		4.000		1.380		1.377				
			Rincian: Penyediaan /pemeliharaan Fasilitas PSU perumahan																
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah kegiatan sosialisasi Perda Perbub PSU		2 kali	75.000.000	2 kali	80.250.000	2 kali	85.867.500	2 kali	91.878.225	2 kali	98.309.701				
			Rincian: Sosialisasi																

			Perda Perbub PSU																
			Verifikasi Penyerahan PSU Permukima n dan Pengemban g	Jumlah PSU yang diserahkan ke pemerintah		60 PSU	50 00. 00 00 0												
			RincianPen yerahan PSU kepada Pemerintah Daerah																
			PROGRAM PENYELES AIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah sengketa tanah yang terselesaika n		2 Perk ara	40. 00 00. 00 00	2 Perkar a	42. 80 00. 00 00	2 Perkar a	45. 79 60. 00 00	2 Perkar a	49. 00 17 20	2 Perkar a	52. 43 18 40				
			Penyelesai an Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang		100 %	40. 00 00. 00 00	100%	42. 80 00. 00 00	100%	45. 79 60. 00 00	100%	49. 00 17 20	100%	52. 43 18 40				

			Dalam Daerah Kabupaten / Kota	terselesaikan															
			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	Dokumen inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pernahanyang tersusun		1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	21.400.000	1 dokumen	22.898.000	1 dokumen	24.500.860	1 dokumen	26.215.920				
			Rincian: Biaya Operasional pelaksanaan inventarisasi perkara pertanahan																
			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah sengketa tanah garapan yang		2 perkara	20.000.000	2 perkara	21.400.000	2 perkara	22.898.000	2 perkara	24.500.860	2 perkara	26.215.920				

			dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	terleleseaik an														
			Rincian: Biaya Operasional penyelesaian sengketa tanah															
			PROGRAM REDISTRIB USI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi dan ganti rugi Tanah yang tercapai		100 %	20.000.000	100%	21.400.000	100%	22.898.000	100%	24.500.860	100%	26.215.920			
			Penetapan Subyek dan Obyek	Persentase penetapan subyek dan		100 %	20.00	100%	21.40	100%	22.89	100%	24.50	100%	26.21			

			Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	obyek redistribusi tanah yang tercapai			0.000		0.000		8.000		0.860		5.920				
			Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah obyek reforma agraria		100 %	20.000.000	100%	21.400.000	100%	22.898.000	100%	24.500.860	100%	26.215.920				
			Rincian: Biaya Operasional Pelaksanaa																

			n kegiatan Redistribusi Tanah																
			PROGRAM PENATAGU NAAN TANAH	Persentase Penataguna an Tanah yang baik		100 %	50. 00 0.0 00	100%	53. 50 0.0 00	100%	57. 24 5.0 00	100%	61. 25 2.1 50	100%	65. 53 9.8 01				
			Penggunaa n Tanah yang Hampan nya dalam satu Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pelaksanaa n penggunaan tanah		100 %	50. 00 0.0 00	100%	53. 50 0.0 00	100%	57. 24 5.0 00	100%	61. 25 2.1 50	100%	65. 53 9.8 01				
			Koordinasi dan Sinkronisas i Perencanaa n Penggunaa n Tanah	Persentase pelaksanaan penggunaan tanah		100 %	50. 00 0.0 00	100%	53. 50 0.0 00	100%	57. 24 5.0 00	100%	61. 25 2.1 50	100%	65. 53 9.8 01				
			Rincian:Bia ya Operasional Pelaksanaa																

			n Koordinasi dan singkronisa si perencanaa n penggunaa n tanah																
			PROGRAM PENYELEN GGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTA N JALAN (LLAJ)	Persentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum layak jalan		100 %	5.7 45. 00 0.0 00	100%	6.1 47. 15 0.0 00	100%	6.5 77. 45 0.5 00	100%	7.0 37. 87 2.0 35	100%	7.5 30. 52 3.0 77				
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten /Kota	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun		100 %	12 5.0 00. 00 0	100%	13 3.7 50. 00 0	100%	14 3.1 12. 50 0	100%	15 3.1 30. 37 5	100%	16 3.8 49. 50 1				
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi	Persentase kegiatan kebijakan dan		100 %	50. 00	100%	53. 50	100%	57. 24	100%	61. 25	100%	65. 53				

			Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten yang ditetapkan			0.000		0.000		5.000		2.150		9.801				
			Rincian: Penganugrahan Duta Tertib Lalu-lintas (Wahana Tata Nugraha)																
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ yang tercapai		4 Rakor	75.000.000	4 Rakor	80.250.000	4 Rakor	85.867.500	4 Rakor	91.878.225	4 Rakor	98.309.701				
			Rincian: Peningkatan Disiplin Masyarakat																

			pengguna dan jasa transportas i Forum LLAJ																
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Persentase perlengkap an jalan yang terpasang		95%	3.3 85. 00 0.0 00	95%	3.6 21. 95 0.0 00	95%	3.8 75. 48 6.5 00	95%	4.1 46. 77 0.5 55	95%	4.4 37. 04 4.4 94				
			Pembangun an Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase prasarana jalan yang terpasang dalam kota		90%	20 0.0 00. 00 0	90%	21 4.0 00. 00 0	90%	22 8.9 80. 00 0	90%	24 5.0 08. 60 0	90%	26 2.1 59. 20 2				
			Rincian: Penyediaan Rambu Bersuar Flasher																
			Penyediaan Perlengkap an Jalan di Jalan	Persentase perlengkap an jalan yang tersedia		90%	30 0.0 00.	90%	32 1.0 00.	90%	34 3.4 70.	90%	36 7.5 12.	90%	39 3.2 38.				

			Kabupaten/ Kota Rincian: Rambu tidak bersuar				00 0		00 0		00 0		90 0		80 3				
			Rehabilitasi dan Pemelihara an Prasarana Jalan	Persentase pemeliharaa n prasarana jalan yang terpasang		100 %	15 0.0 00. 00 0	100%	16 0.5 00. 00 0	100%	17 1.7 35. 00 0	100%	18 3.7 56. 45 0	100%	19 6.6 19. 40 2				
			Rincian: Rehabilitasi /Pemelihar aan Rambu Bersuar dan Tidak Bersuar																
			Rehabilitasi dan Pemelihara an Perlengkap an Jalan			100 %	2.7 35. 00 0.0 00	100%	2.9 26. 45 0.0 00	100%	3.1 31. 30 1.5 00	100%	3.3 50. 49 2.6 05	100%	3.5 85. 02 7.0 87				
			Rincian: Pemelihara an alat																

			penerangan jalan (PJU)																
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase pengelolaan gedung terminal dengan baik		100 %	50.0000	100%	53.5000	100%	57.2450	100%	61.252150	100%	65.539801				
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase terpeliharaan gedung terminal		2 Terminal	50.0000	2 Terminal	53.5000	2 Terminal	57.2450	2 Terminal	61.252150	2 Terminal	65.539801				
			Rincian: Pemeliharaan gedung terminal																
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas		100 %	100.0000	100%	107.0000	100%	114.4900	100%	122.504300	100%	131.079601				

			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas Jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas		100 %														
							100.000	100%		107.000	100%		114.490	100%		122.530	100%		131.079.601	
			Rincian: Rambu Tidak																	

			Bersuar(Ma rka Jalan)																
			Penyediaa n Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Terselengga ranya Sosialisasi sopir Angkutan Umum, Duta Tetib Lalu Lintas		100 %	22 5.0 00. 00 0	100%	24 0.7 50. 00 0	100%	25 7.6 02. 50 0	100%	27 5.6 34. 67 5	100%	29 4.9 29. 10 2				
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah ketersediaan angkutan umum yang terkendali dan terawasi serta pembinan angkutan jalan		10 Kegi atan	50. 00 0.0 00	10 Kegiat an	53. 50 0.0 00	10 Kegiat an	57. 24 5.0 00	10 Kegiat an	61. 25 2.1 50	10 Kegiat an	65. 53 9.8 01				

			Kabupaten/ Kota																
			Rincian: Sosialisasi Pengguna Angkutan Umum, Duta Tetib Lalu Lintas																
			Pengendali an dan Pengawasa n Ketersediaa n Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Terselenggar anya Operasi PAM		100 %													
							17 5.0 00. 00 0	100%		18 7.2 50. 00 0	100%		20 0.3 57. 50 0	100%		21 4.3 82. 52 5	100%		22 9.3 89. 30 2
			Rincian: Pengamana																

			n Lebaran Tahun Baru , Insidentil																
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang memadai		100 %	1.00.00.00	100%	1.070.00.00	100%	1.144.90.00	100%	1.225.04.30.00	100%	1.310.79.60.10				
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha	Persentase fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir		100 %	1.00.00.00	100%	1.070.00.00	100%	1.144.90.00	100%	1.225.04.30.00	100%	1.310.79.60.10				

			Terintegrasi secara Elektronik																
			Rincian: Peningkatan pengelolaan perpajakan																
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase tercapainya pengujian kendaraan bermotor		100 %	8600000	100%	9200000	100%	984614000	100%	1053536980	100%	1127284569				
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia		100 %	7500000	100%	80250000	100%	858675000	100%	918782250	100%	983097008				
			Rincian:																
			Pengadaan layanan pengujian kendaraan bermotor			100 %	15000000	100%	160500000	100%	1717350000	100%	183756450	100%	196619402				

			(DRIVE THRU)																
			Fasilitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengadaan Kartu Uji, Pengadaan Printer Cetak Hasil Uji			200000 Kartu Uji, 3 Printer Khusus Cetak Uji	6000000	200000 Kartu Uji, 3 Printer Khusus Cetak Uji	642.0000	200000 Kartu Uji, 3 Printer Khusus Cetak Uji	686.940.000	200000 Kartu Uji, 3 Printer Khusus Cetak Uji	735.025.800	200000 Kartu Uji, 3 Printer Khusus Cetak Uji	786.477.606				
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara		10 Sarp ras	110000000	10 Sarp ras	117.700.000	10 Sarp ras	125.939.000	10 Sarp ras	134.754.730	10 Sarp ras	144.187.561				
			Rincian: Pemeliharaan Sarana Dan Peralatan Pengujian																

			Kendaraan Bermotor																
							24		25		27		29		31				
							.0		.7		.5		.5		.5				
							90		76		81		11		77				
							.4		.7		.1		.8		.6				
							52		84		59		40		68				
							.4		.1		.0		.1		.9				
							77		50		41		74		86				

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tahun 2021–2026 ini dibuat dengan memperhatikan langkah-langkah manajemen strategik sehingga diharapkan dapat mengakomodasikan kondisi riil dari variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pembangunan perhubungan Perumahan, Permukiman dan Perhubungan baik secara makro (eksternal) maupun mikro (internal) dengan mempertimbangan kondisi kedepan.

Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tahun 2021–2026 ini merupakan acuan dasar yang terdiri dari kegiatan pokok dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Karena perkembangan kondisi makro sangatlah cepat tentunya akan memerlukan penyesuaian-penyesuaian sehingga menjadi fleksibel tetapi tetap dalam koridor/tatanan yang memegang azas kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan bertanggung jawab sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Demikianlah perencanaan strategik dari pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tahun 2021–2026 ini dibuat untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan guna terlaksananya pembangunan yang terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan dan tepat sasaran.